

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA)**

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pada LKPD Kabupaten Mimika. Data diperoleh melalui dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kabupaten Mimika dan wawancara pejabat yang berkompeten dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK yang menunjukkan bahwa status tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi (18%) lebih rendah daripada status tindak lanjut yang masih dalam proses (23%) dan status tindak lanjut yang belum diselesaikan (58%).

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Mimika yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan *stakeholder*, lemahnya penegakan sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi objek yang diperiksa, SDM yang masih kurang dalam memahami akuntansi keuangan daerah (khususnya pertanggungjawaban keuangan daerah) serta SDM yang diletakkan tidak sesuai dengan kompetensinya melainkan sarat dengan kepentingan, lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah karena tidak didukung dengan aturan maupun kebijakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan, kurangnya komitmen pimpinan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, perubahan struktur organisasi yakni restrukturisasi kelembagaan dan mutasi jabatan, serta keberterapan rekomendasi auditor dalam membuat suatu rekomendasi yang kurang aplikatif dan setiap anggota tim yang memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda, sangat memungkinkan untuk memberikan penilaian yang berbeda dari tim sebelumnya, sehingga rekomendasi dengan substansi yang sama kemungkinan akan berulang lagi.

Kata kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LHP BPK, tindak lanjut Rekomendasi

**FACTORS AFFECTING THE COMPLETION OF THE FOLLOW-UP RECOMMENDATIONS ON THE RESULTS OF THE EXAMINATION OF THE AUDIT BOARD ON THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS (CASE STUDY ON LOCAL GOVERNMENT OF MIMIKA DISTRICT)**

**ABSTRACT**

*This research is to identify factors that affect the completion of the follow-ups of the examination of the local government financial reports from 2010 to 2014 in the LKPD of Mimika district. Data was obtained through the document examination report (LHP) of Mimika District and from interviews with the relevant authorities regarding the completion of the follow-up activities recommended by the Audit Board of Indonesia. The analysis of documents has indicated that the rate of completion of the recommendation of the audit of the financial statements is still low. It can be seen from the results of the monitoring by the Audit Board. They indicate that the status of follow-ups that is already in accordance with the recommendation is 18%, lower than the status of the ongoing follow-ups which is 23%; and also lower than the status of the unresolved follow-ups, which is 58%.*

*The study also found that factors affecting the low completion of the follow-up recommendations on the results of the examination of the LKPD of Mimika is various such as: the absence of coordination between the government and the stakeholders; the poor enforcement of sanctions, which then has given no deterrent effect to the object being examined; poor knowledge among the human resources regarding local financial accounting (especially the financial accountability by the local area); poor job distribution, for some have not been posted in accordance with their competence (interest-rich placement); weak local financial management systems, for it is not supported with rules and policies provided as guidance for local financial management; lack of leaders' commitment towards other parties involved in the settlement of the follow-ups of the Audit Board's recommendations; changes in the organizational structure namely the institutional restructuring and reposition; less applied recommendation by the auditor; and the various perspectives and assessment that are possibly given by each member of the team to the previous team so that recommendation with the same content is likely to be repeated.*

Key words: financial statement, LHP BPK, follow-ups.